



## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

### DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300

---

#### LAPORAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PPID DAN PEJABAT PENGHUBUNG LAPOR TAHUN 2025

##### LATAR BELAKANG

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap Badan Publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dan pelayanan informasi publik. Dalam hal ini PPID memiliki peranan yang sangat penting dalam hal mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik. Rapat ini merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Kabupaten Tanah Laut sekaligus turut berpartisipasi membangun pelayanan publik berbasis bukti. Kita semua menyadari bahwa permintaan informasi sering kita dapati baik dari badan publik sendiri maupun dari LSM dan pihak pihak lainnya. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk betul betul memahami katagori informasi yang wajib disediakan dan informasi yang dikecualikan beserta alasan dan dasar hukumnya. Dalam tahun 2024, pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut mendapat predikat menuju Informatif dengan skor 85,98 hasil Monev dari Komisi Informasi Publik Kalimantan Selatan, secara urutan Kabupaten Tanah Laut berada pada peringkat kedua se Kalimantan Selatan. Untuk itu kami kembali mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Seluruh PPID Pelaksana SKPD atas kerjasamanya selama ini, semoga tahun 2025 ini kita bisa meningkatkan skor sehingga mendapatkan predikat Informatif.

Perlu kami sampaikan pula bahwa Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi telah kami lakukan terhadap 3 SKPD yaitu Inspektorat, Satpol PP dan Damkar serta Diskominfo, kami berharap pada akhirnya nanti seluruh SKPD dapat melakukan uji konsekuensi Informasi.

Dalam tata kelola Pemerintahan, aduan dan aspirasi dari masyarakat diperlukan untuk perbaikan kebijakan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka menyosialisasikan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) ini, selain melalui media Radio Tuntung Pandang dan media sosial, kami juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di setiap desa se Kabupaten Tanah Laut. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan LAPOR, kami telah melaksanakan bimbingan teknis kepada operator LAPOR SKPD tentang integrasi layanan aduan SKPD dan LAPOR, dan seluruh SKPD telah melaksanakan integrasi tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan LAPOR Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, Kabupaten Tanah Laut mendapat kembali meraih peringkat

pertama untuk laju tindak lanjut dan laju verifikasi. Namun demikian, pengelolaan LAPOR oleh SKPD masih perlu peningkatan wawasan bagi pejabat penghubung LAPOR dalam pengelolaannya.

## TUJUAN

Rakor ini bertujuan untuk menguatkan PPID serta Pejabat Penghubung LAPOR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dan pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. Pelayanan yang berbasis Informasi dan Dokumentasi ini bersifat terbuka agar keterbukaan Informasi dari Pemerintah kepada masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat melalui sumber yang akurat dan terpercaya,

Dari hasil penyelenggaraan Rapat Koordinasi PPID dan Pejabat Penghubung LAPOR ini diharapkan adanya tindak lanjut terkait dengan : Adanya koordinasi dan sosialisasi internal Unit Kerja/UPT tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama perihal pengelolaan dokumen dan sengketa informasi. Tercapainya penyelenggaraan program dan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi berdaya guna dan berhasil guna. Meningkatnya kepedulian PPID dan kontrol terhadap pengelolaan dokumen Informasi Publik serta Daftar Informasi Publik yang dikuasi secara berkala, meningkatkan peran serta seluruh SKPD dalam mensosialisasikan layanan SP4N Lapor kepada masyarakat dan tertanganinya aspirasi dan pengaduan masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.

## WAKTU DAN TEMPAT

Rakor PPID dan Pejabat Penghubung LAPOR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Barakat Lt. II Setda Tanah Laut.

## PESERTA

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para Sekretaris SKPD yang merupakan Pejabat pengelola Informasi Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Penghubung LAPOR pada masing masing SKPD.

## NARASUMBER

Narasumber pada kegiatan ini dari Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Selatan dengan materi Peran PPID Pelaksana dalam Keterbukaan Informasi Publik dan Teknik Pengklasifikasian informasi yang dikecualikan.

## PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan pada hari ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

RUNDOWN ACARA RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI DAN  
PEJABAT PENGHUBUNG LAPOR KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

No.	SUSUNAN ACARA	PELAKSANA	KETERANGAN
1	PEMBUKAAN	MC	
2	MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA	MC	
3	PEMBACAAN DOA	AHMAD FAUZI, S.KOM	
4	LAPORAN KEPALA DINAS KOMINFOSTASAN	RIKA AMALIA, SSTP, M.Si	
5	ARAHAN BUPATI SEKALIGUS MEMBUKA ACARA	WAKIL BUPATI	
6	FOTO BERSAMA	MC	
7	PENYAMPAIAN MATERI DARI NARASUMBER	1. KEPALA BIDANG KOMUNIKASI  2. KOMISI INFORMASI PUBLIK KALIMANTAN SELATAN	15 MENIT.  2 JPL
8	DISKUSI DAN TANYA JAWAB	MODERATOR	30 MENIT
9	PENUTUP	MC	

## **NOTULEN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGHUBUNG LAPOR KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

- Kegiatan : Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Monitoring evaluasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) tahun 2025.
- Tempat : Ruang Rapat Barakat Lt. II Setda Tanah Laut
- Tanggal : 11 Maret 2025
- Pukul : 09.00 WITA sampai selesai
- Yang berhadir
- Wakil Bupati Tanah Laut
  - Kepala Dinas Kominfo
  - Para Kepala Bidang Diskominfo Tanah Laut
  - Penanggung Jawab Seksi Kemitraan Penyiaran Dan Informasi Publik
  - Kepala Bagian Hukum Setda Tanah Laut
  - Kepala Bagian Barang Jasa Setda Tanah Laut
  - Seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pelaksana serta pejabat penghubung LAPOR

- IV. Hasil** : Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PPID dan Pejabat Penghubung LAPOR dengan hasil-hasil yang diperoleh :
- Rapat Koordinasi PPID dan Pejabat Penghubung LAPOR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibuka oleh Wakil Bupati Tanah Laut H.M. Zazuli.
  - Laporan Kegiatan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.
  - Narasumber rapat koordinasi adalah Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Publik Kalimantan Selatan Drs. H. Ah. Rijani, M.AP, C. Med dengan materi Peran PPID Pelaksana dalam Keterbukaan Informasi Publik.
  - Narasumber kedua adalah Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Publik Kalimantan Selatan Riduannor, S.PD.I, M.Pd dengan materi Teknik pengecualian informasi.
  - Pada forum diskusi, beberapa permasalahan pengelolaan keterbukaan Informasi Publik dan Pengelolaan Layanan pengaduan melalui LAPOR disampaikan oleh pejabat pengelola Informasi dokumentasi dan pejabat penghubung LAPOR SKPD diantaranya :

- Bagaimana memastikan bahwa informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan.
  - Bagaimana cara melakukan uji konsekwensi terhadap informasi yang ingin dikecualikan
  - Informasi terkait pengadaan barang jasa dan laporan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan, namun dalam penyajian informasi tersebut harus benar benar dipastikan bahwa informasi tidak mengandung unsur pengecualian sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - Dalam pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR, diharapkan SKPD aktif melakukan integrasi laporan dari layanan pengaduan internal ke SP4N LAPOR guna meningkatkan penggunaan SP4N LAPOR sebagai media pengaduan utama.
  - Laporan yang di input manual dari layanan pengaduan internal SKPD ke SP4N LAPOR apakah akan terakumulasi dengan jumlah laporan yang masuk langsung melalui SP4N LAPOR pada statistik di aplikasi eLAPOR
- Evaluasi pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 hasil dari monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Publik Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut memperoleh predikat menuju informatif dengan skor 85,89 dan merupakan peringkat kedua se Kalimantan Selatan.
  - Pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR Kabupaten Tanah Laut menempati peringkat pertama untuk laju tindak lanjut laporan se Kalimantan Selatan.

Penutup

: Demikian notulen rapat koordinasi ini dibuat dan disampaikan, untuk diketahui dan menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Notulis

Margareta Habibah, SST, M.I.Kom

DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI PPID DAN PEJABAT PENGHUBUNG LAPOR

TAHUN 2025

